

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Berakhirnya Perang Dingin, telah memunculkan isu-isu yang secara signifikan mengubah peta politik dunia. Adanya pergeseran persoalan politik dunia seperti konflik agama yang berdampak pada absolutisme agama, konflik etnis, terorisme internasional, dan isu lokal lainnya semakin mempengaruhi arah politik internasional. Perubahan politik tersebut cenderung dan bahkan mengarah pada konflik, baik di dalam maupun antar negara. Konflik ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing kelompok etnis dalam negara bersangkutan, baik identitas etnik, budaya, dan agama maupun kesenjangan sosial-ekonomi.

Konflik etnis merupakan salah satu bentuk konflik lokal yang telah terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Konflik etnis inilah yang pada akhirnya berubah menjadi gerakan separatis yang melanda banyak negara di dunia. Gerakan separatis ini dimaksudkan untuk menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Beberapa contoh gerakan separatis di berbagai negara antara lain: Gerakan separatis Quebec di Kanada, Gerakan separatis Macan Tamil di

Pattani United Liberation Organisation (PULO) di Thailand. Gerakan separatis ini kemudian berubah wujud menjadi persoalan internasional.

Apa yang terjadi di Thailand khususnya di wilayah Thailand Selatan saat ini merupakan konflik etnis yang sejarahnya telah ada sejak 200 tahun yang lalu. Konflik yang pada awal munculnya disebabkan oleh upaya kerajaan Siam (Thai) untuk memasukkan kerajaan Pattani yang berdaulat kedalam wilayah teritori politiknya. Praktis upaya ini mendapat tentangan atau perlawanan dari kerajaan Pattani. Sebuah peristiwa penting perjalanan sejarah Pattani ketika pada tahun 1910 ditandatangani perjanjian perbatasan antara wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Melaya dengan kerajaan Thai. Hasil dari kesepakatan tersebut pihak Inggris mengakui bahwa Patani dengan tiga propinsi Melayu yang lain (Yala, Narathiwat dan Satun) secara defenitif menjadi bagian integral dari kerajaan Siam.⁴

Sejak terbentuknya satuan administrasi baru tersebut otonomi budaya orang Melayu-Muslim mulai terancam. Pemerintah Kerajaan Siam mulai melakukan berbagai program pembaruan yang bertujuan untuk menggantikan identitas agama dan kultural orang Melayu Muslim dengan Budhaisme. Sejak itu pula perlawanan dari masyarakat Pattani mulai terjadi.

Sampai saat ini gejolak konflik yang terkadang diwarnai kekerasan terus terjadi. Nampaknya pemerintah Thailand belum menemukan solusi yang tepat dan berkesinambungan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Thailand

Selatan. Kebijakan resolusi konflik yang diterapkan berbeda-beda implementasinya pada setiap pemerintahan yang sedang berkuasa. Terkadang kebijakan yang bersifat persuasif diterapkan namun terkadang juga kebijakan represif diterapkan untuk membendung keinginan masyarakat Thailand Selatan untuk memisahkan diri.

Perbedaan pendekatan penyelesaian konflik yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang berkuasa di Thailand khususnya pada masa pemerintahan PM Thaksin Sinawatra menjadi alasan penulis untuk mengambil judul tersebut diatas sekaligus untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam dinamika konflik di Thailand Selatan.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar :

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Thailand dalam upaya resolusi konflik di Thailand Selatan.
2. Untuk menambah wawasan mengenai evolusi dan dinamika konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.
3. Untuk melihat kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam konflik di Thailand Selatan
4. Dan lain-lain yang bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah

5. Tujuan lain adalah untuk memperoleh derajat sarjana hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Konflik di Thailand Selatan merupakan proses keberlanjutan sejarah sekaligus buah evolutif dinamika geopolitik di Semenanjung Malaya yang dimulai sejak abad pertengahan. Konflik dan pergolakan dimulai dari kekalahan Kerajaan Malaka dari Portugis yang menguasai semenanjung sejak sekitar permulaan abad 16. Dilanjutkan dengan adanya kesepakatan antara Kerajaan Siam (Thai) dengan Inggris melalui Perjanjian Anglo – Siam tahun 1909 dan Perjanjian Bangkok 1910 yang menetapkan bahwa wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat berada dibawah kekuasaan Bangkok. Konsekuensi praktis dari perjanjian ini, sekitar tahun 1910 Kerajaan Siam mulai menekankan penggunaan bahasa Thailand dan berbagai simbol sosio-kultural di wilayah Selatan. Sejak itu dimulailah gerakan menentang kekuasaan kerajaan Siam

Faktor utama yang telah membantu mendukung separatisme Melayu-Muslim Thailand Selatan adalah etnisitas dan solidaritas keagamaan. Kedua faktor itu juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Islam dan etnisitas Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat minoritas menentang campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat Melayu-Muslim di Thailand Selatan

Konflik terjadi ketika orang/kelompok mengejar sasaran/tujuan yang bertentangan. Konflik biasanya dapat diatasi tanpa memunculkan kekerasan. Konflik juga meliputi semua hubungan kemanusiaan, baik hubungan sosial, hubungan ekonomi maupun hubungan kekuasaan. Konflik muncul akibat ketidakseimbangan pada hubungan-hubungan ini, misalnya status sosial, kekayaan dan akses terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak adil mengakibatkan berbagai persoalan seperti diskriminasi, kemiskinan dan kejahatan.² Konflik yang terjadi di Thailand saat ini karena adanya ketidakseimbangan pada hubungan-hubungan tersebut diatas.

Disparitas ekonomi antara pusat kota Bangkok dan wilayah Thailand Selatan yang begitu mencolok dapat dilihat dengan perbandingan pendapatan perkapita penduduk di Kota Bangkok yang penduduknya memiliki pendapatan perkapita 51.441 bath sementara wilayah Selatan hanya 16.148 bath atau hampir tiga kali lipat lebih rendah dibandingkan Bangkok. Disparitas ini menimbulkan kekecewaan, kecemburuan dan rasa tidak adil yang kemudian berakibat pada keinginan untuk mengatur diri mereka sendiri.

Ketidakadilan dan diskriminasi diperkirakan menjadi penyebab utama dari konflik di Thailand Selatan saat ini. Ini mencakup sektor pendidikan, lapangan kerja, dunia usaha dll. Di sektor lapangan kerja misalnya di tiga pemda propinsi itu pegawai yang beragama Islam mulanya kurang dari 10 % walaupun penduduk di tiga propinsi itu mayoritas beragama Islam (80%). Dari gubernurnya hingga pegawai

² *Shahar, Mengenal Konflik Masyarakat, Dari Teori, Strategi dan Implementasi Berakibat*

rendahan di pegang oleh warga Budhist. Akibat dari ketidakadilan dan diskriminasi ini, kehidupan warga Muslim di tiga propinsi itu, khususnya yang tinggal di desa-desa lebih miskin dari warga Thailand lainnya. Kelompok separatis memanfaatkan momentum ini untuk menggalang kekuatan bersama masyarakat untuk menentang pemerintah Thailand.

Konflik yang tidak pernah surut antara pemerintah dan komunitas Thailand Selatan kembali memanas tatkala terjadi pembantaian di Masjid Krue Se dan insiden Tak Bay. Pada April 2004, sekitar 30 pemuda Muslim ditembak oleh tentara di masjid Kru Se. Masjid ini sangat bersejarah karena didirikan pada abad 15, masjid tertua di Thailand. Peristiwa kedua adalah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Tak Bay meninggal diperjalanan, setelah mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan dibelakang.³ Dua peristiwa ini sangat membekas di hati Muslim, dan banyak pemuda dan masyarakat Muslim semakin menggiatkan penyerangan terhadap berbagai organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Kejadian dan tragedi tersebut juga semakin mengerucutkan niat kelompok gerakan perlawanan PULO (*Pattani United Liberation organisation*) untuk memperkeras sikap menuntut pemisahan diri.

Mata rantai utama antara nasionalisme dan konflik adalah bangkitnya semangat identitas berbagai kelompok bangsa yang pembagian geografisnya menyimpang dari garis batas internasional. Bangsa yang merasa tidak menjadi bagian dari suatu negara akan merasa sistem negara-bangsa menindas hak-hak asasinya.

³ www.kompas.com/kompas_cetak/0606/10/04/2725109.htm diakses 17 Februari 2008

Sebuah entitas bangsa yang dimasukkan ke dalam negara-bangsa lain dan tersebar di dalam dua atau lebih negara yang kemudian menolak penguasaan pemerintahan negara mereka sendiri sehingga lebih cenderung melakukan pemberontakan.

Formalitas gerakan perlawanan pertama di Thailand Selatan dilakukan oleh Tengku Mahmud Muhyidin dengan organisasi GAMPAR (Gabungan Melayu Pattani Raya) yang bertujuan menyatukan seluruh wilayah Thailand Selatan dan mendekatkan kontak dengan saudara-saudara seetnis di Malaysia serta melakukan upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Melayu. Dewasa ini terdapat gerakan yang paling aktif dalam melakukan perlawanan yaitu PULO (Pattani United Liberation Organization) yang dibentuk tahun 1968 oleh Kabir Abdul Rahman alias Tengku Bira Kotanila.

Organisasi PULO mengalami metamorfosa menjadi New PULO pada tahun 1995 yang diprakarsai oleh Arong Mooreng dan Haji Abdul Rahman Baso. Secara garis besar, munculnya perlawanan minoritas Melayu terbagi dalam 2 faktor kunci, yaitu : *Pertama*, tumbuhnya gerakan nasionalisme Melayu dan *Kedua*, kebijakan Pemerintah Thailand terkait isu sosio-kultural, bahasa dan kurikulum pendidikan di Thailand Selatan. Kedua faktor ini diperburuk oleh isu etnisitas religius yang membagi secara frontal antara Budha dan Muslim yang mulai bersemi sejak dekade tahun 1960-an.⁴

Kelompok gerakan separatis semisal PULO berupaya memperjuangkan kemerdekaan bagi keempat propinsi di wilayah Thailand Selatan sebagai akibat dari

tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap minoritas Muslim-Melayu melalui program-program pemerintah Thailand seperti pembaruan administratif, proses asimilasi satu bangsa yaitu bangsa Thailand, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi akibat eksploitasi pemerintah pusat disamping adanya pengaruh gejolak politik regional dan internasional yang semakin memperkeruh suasana kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut semakin mengesankan karena pemerintah Thailand memaksakan diri melalui konsep negara dengan ideologi Budhisme dan militeristik. Kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya telah mengecewakan kaum Melayu-Muslim.

Tindakan untuk menuntut perbaikan kondisi kehidupan masyarakat Thailand Selatan yang dilakukan oleh masyarakat Thailand Selatan yang juga terkadang menggunakan media pemberontakan seperti penyerangan, pemboman, dll direspon negatif oleh pemerintahan yang berkuasa. Pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra kebijakan represif cenderung untuk dilakukan.

Ketidakmampuan pemerintahan Thaksin Shinawatra dan aparat keamanan dalam menurunkan eskalasi kekerasan ditandai dengan diperpanjangnya berkali-kali setiap tiga bulan hukum darurat di tiga propinsi. Hukum darurat (*martial law*) telah dikeluarkan sejak bulan Juli 2005. Dalam dekrit hukum darurat ini, Perdana Menteri dapat menyatakan daerah rusuh di Thailand Selatan sebagai zona darurat selama tiga bulan, memungkinkan penahanan tersangka selama 30 hari, dan memberikan imunitas hukum kepada penegak hukum yang melaksanakan tugas. Dekrit mengenai

hukum darurat ini telah memperoleh restu Raja Bhumibol Adulyadej pada saat PM Thaksin Sinawatra beraudiensi dengan beliau pada tanggal 23 Juli 2005.

Dikeluarkannya dekri ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Disamping itu, pemerintah menempatkan 1000 paramiliter rangers, 40.000 tentara dan polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Thailand Selatan tetapi sejauh ini hasilnya tidak memuaskan bahkan sebagian kelompok masyarakat menghendaki penarikan jumlah pasukan yang dianggap melebihi porsinya.

Penyelesaian konflik di Thailand Selatan masih terus berlangsung dan membutuhkan waktu karena antara penduduk setempat yang mayoritas Muslim Melayu dan Budhist Siam masih saling curiga sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik antar penduduk di wilayah Thailand Selatan. Dan juga adanya upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk mempertahankan atau membiarkan agar konflik ini terus terjadi karena adanya keuntungan besar yang didapatkan dari konflik ini.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji disini adalah : bagaimanakah kebijakan resolusi konflik yang diterapkan oleh pemerintah Thailand khususnya pada masa pemerintahan PM Thaksin Sinawatra terhadap gerakan separatisme di Thailand Selatan

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Karena penelitian ini bersifat eksploratif berdasarkan studi kepustakaan, maka dasar-dasar teoritik yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dikembangkan melalui konsep-konsep deskriptif.

Teori Resolusi Konflik

Professor Burton membedakan antara resolusi konflik, manajemen dan penyelesaian (*settlement*). Manajemen adalah dengan kecakapan resolusi perselisihan alternatif dan dapat menampung atau membatasi konflik. Penyelesaian adalah dengan proses wewenang dan hukum dan dapat dipaksakan oleh kelompok elit. Burton menyatakan dengan gamblang sekali:

..Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar manajemen atau *settlement*, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.⁵

Dengan menerima asumsi dan hipotesa Teori Kebutuhan Manusia, Burton menyatakan bahwa perlu adanya pergeseran paradigma dari politik kekuasaan ke arah realitas kekuasaan individu.⁶ Dengan kata lain, individu-individu, sebagai anggota kelompok-kelompok identitasnya, akan memperjuangkan kebutuhannya di dalam lingkungannya sendiri. Jika usaha mereka dihalang-halangi oleh kelompok elit, kelompok identitas lain, lembaga-lembaga dan segala bentuk wewenang/otoritas lainnya, maka tak terelakkan lagi akan terjadi konflik. Satu-satunya solusi adalah

kelompok-kelompok itu menyelesaikan masalahnya sendiri secara analitis, didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan penguasa.

Jika partisipan konflik itu dapat mulai mengenal konfliknya sebagai kerusakan hubungan, dan ada persamaan mendasar antara yang bertikai, maka proses abstraksi akan meningkatkan keobjektifannya. Tujuan proses ini adalah untuk memungkinkan partisipan konflik memahami bahwa semua partisipan mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sah yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan konflik itu.

Burton selanjutnya mencatat:

..Resolusi konflik adalah, dalam jangka panjang, suatu proses perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.⁷

Pendekatan tradisional terhadap manajemen atau pengaturan konflik atau umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi 'settlements.' Pendekatan-pendekatan ini hanya akan berjalan jika pihak-pihak yang berkonflik setuju untuk bernegosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata yang dapat mereka tawarkan (*bargain*).

Versi lain tentang resolusi konflik adalah apa yang ditawarkan Johan Galtung.

Galtung menawarkan tiga model yang berkaitan satu sama lain yaitu *peace keeping*

peace making, dan *peace building*.⁸ Ketiga kerangka model itu bisa dilihat dengan tabel dibawah ini :

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	Peace keeping (aktivitas militer)	Kelompok “pejuang” atau para militer
Pertentangan Kepentingan	Peace making (aktivitas politik)	Pemimpin/tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	Peace building (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Sumber : Tubagus Arif Faturahman; 2001

Model *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Peace making* adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode yang bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, dan Kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik.

Sedangkan model *peace building* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan keadaaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dengan

⁸ Johan Galtung, *Peace War and Defence-Essay in Peace Research*, vol.2, Copenhagen; Christian

cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu : *Pertama*, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. *Kedua*, adanya dukungan dari lingkungan sosial. *Ketiga*, komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). *Keempat*, proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak dan *Kelima*, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

Dalam konflik Thailand Selatan, penerapan resolusi konflik yang terbagi menjadi tiga tahap dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa secara berbeda-beda. PM Thaksin Shinawatra lebih mengutamakan tahap *peace keeping* yang diterapkan dengan memberlakukan hukum darurat di wilayah Selatan. Thaksin melakukan penempatan polisi dan militer dengan jumlah yang sangat besar di wilayah Selatan sekitar 40.000 orang. Operasi militer pun gencar dilaksanakan untuk meredam gejolak kekerasan yang meningkat.

Tahap *peace making* tetap dijalankan dengan adanya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang dibentuk. Namun kinerja komisi ini tidak terlalu signifikan dan membawa dampak perubahan positif bagi kemajuan penyelesaian konflik karena

F. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang ditetapkan maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

PM Thaksin Shinawatra menerapkan resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dengan jalan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional, namun kebijakan ini tidak mampu memberikan kontribusi yang riil dalam upaya penurunan tingkat eskalasi kekerasan dan keluarnya Security Act tahun 2005 malah berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan bersenjata. Pemerintahan PM Thaksin Sinawatra lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*peace keeping*) daripada pendekatan persuasif (*peace making dan peace building*)

G. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema dan melihat permasalahan yang ada, maka pembahasan skripsi ini difokuskan pada model resolusi konflik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Thailand semasa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra dalam rangka mempercepat proses penyelesaian konflik di wilayah Thailand Selatan.

Fokus kajian akan ditekankan pada tahun 2004 di masa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra dengan berbagai kebijakannya yang memicu terjadinya

Narathiwat dan Yala) sampai tahun 2006 dimasa terjadinya kudeta militer ditandai naiknya Surayud Chulanont sebagai perdana menteri.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa kualitatif, dalam artian mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, dari berbagai sumber tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal berita, internet dan catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan fasilitas perpustakaan, sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab. Secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini adapt diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi pendahuluan, yang diawali dengan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan perkembangan konflik di Thailand Selatan, meliputi latar belakang sejarah konflik, faktor penyebab terjadinya pemberontakan etnis Melayu-